PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP PRATAMA BIAK-PAPUA)

Muniroh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara Malang
Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang, 65142, Jawa Timur

surel : muniroh@gmail.com

ABSTRAKSI

Abstrak. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pajak selama ini merupakan penerimaan terbesar bagi pembangunan, oleh karenanya pemerintah memberikan sanksi denda pada wajib pajak yang tidak membayar pajak dan pada tahun 2016 meluncurkan program *Tax Amnesty* (pembebasan denda pajak). Program ini bertujuan agar wajib pajak dapat transparan dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Program ini memberikan pembebasan denda pajak dan potongan tarif, hanya membayar uang tebusan saja yang tarifnya jauh lebih kecil dibandingkan tarif normalnya atas harta yang dimiliki tetapi belum dilaporkan di SPT nya. Penelitian ini menggunakan metode analisa Regresi Berganda dengan obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Biak Numfor (Papua). Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan Program *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan program *Tax Amnesty* memiliki pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah perlu melakukan *Tax Amnesty* agar masyarakat mau melaporkan pendapatan dan hartanya secara transparan. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak perlu merasa khawatir lagi akan adanya pemeriksaan di kemudian hari. Dan atas hasil ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Papua belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak. Oleh karenanya pemerintah perlu untuk lebih intens melakukan sosialisai tentang perlunya penerimaan pajak bagi negara kita.

Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Program *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract. The Effect of Tax Sanctions and Tax Amnesty Programs on Taxpayer Compliance. Taxes have so far been the largest revenue source for development, therefore the government imposes fines on taxpayers who do not pay taxes and in 2016 launched the *Tax Amnesty* program (exemption of tax penalties). This program aims to make taxpayers transparent in paying and reporting their taxes. This program provides

exemption from tax penalties and rebates, only paying a ransom which is much lower than the normal rate for assets owned but not reported in the SPT. This study uses the Multiple Regression analysis method with the object of this research is the taxpayer who is registered at the KPP Pratama Biak Numfor (Papua). This study shows that tax sanctions and the Tax Amnesty Program simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the Tax Amnesty program has a dominant influence on taxpayer compliance. The implication of this research is that the government needs to carry out Tax Amnesty so that people want to report their income and assets transparently. This is because taxpayers do not have to worry about audits at a later date. And this result also shows that the Papuan people do not yet have awareness about the importance of paying taxes. Therefore, the government needs to be more intense in conducting socialization about the need for tax revenue for our country.

Keywords: Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Dalam undang-undang No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih dari 75% sumber pendapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan primadona sumber penerimaan Indonesia. Ini sesuai artikel yang ada di website Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>).

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun atau setara 53,5% dari target penerimaan pajak non migas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun 2015 yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), menurut Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteady. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan tersebut seperti PPh pasal 22 impor dan PPN impor seiring penurunan impor. Dan wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah, terutama wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi

belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi

indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Tabel 1:
Tingkat Kepatuhan WP tahun 2013-2016

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Tingkat/ratio kepatuhan WP	56,36%	59,88%	56,36%	62,2%

Sumber: Direktorat jendral pajak 01 Maret 2017
(<http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>).

Sanksi perpajakan terdiri atas 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka Direktorat Jendral Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty*.

Program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang amnesti pajak No.11 tahun 2016. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, keikutsertaan dalam program Amnesti Pajak atau "*Tax Amnesty*" menandakan Wajib Pajak bersedia membangun budaya baru kepatuhan pajak, hal ini ditandai dengan para wajib pajak sudah mulai membayar dan melaporkan pajak dengan baik dan benar. Pemerintah mengharapkan dengan adanya *Tax Amnesty* dapat bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional, bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara. Selanjutnya, tax amnesty memperluas *tax base*, sehingga kedepan akan menambah jumlah wajib pajak," harapannya agar uang yang diterima bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, ujar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disampaikannya kepada tim liputan 6 pada 16 Agt 2017 (*bisnis.liputan6.com* › *Bisnis* › *Ekonomi*).

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan atau patuh

apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikan. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka direktorat jendral pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2016), menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sanksi perpajakan dan program *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Dian dan Anggraeni (2011) mengatakan kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak.

Sedangkan Istiqomah (2016) menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan WPOP yang mempunyai usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun tahun dan jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan persepsi dan kesadaran wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di

Denpasar Timur dan kabupaten Minahasa Selatan (Muliari dan Setiawan, 2009; Tiraada, 2013)

Selanjutnya, pertanyaannya apakah sanksi perpajakan dan Tax Amnesty akan mempunyai dampak pada wajib pajak di KPP Biak Papua seperti halnya di KPP daerah yang lain mengingat daerah ini merupakan daerah terpencil. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh kedua variabel diatas terhadap wajib pajak di KPP Biak Papua.

TELAAH LITERATUR

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
 - a) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda

ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

- b) Sanksi Administrasi berupa bunga, sebesar 2% setiap bulan dari pajak yang terutang. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
 - c) Presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 - d) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.
2. Sanksi Pidana yang terdiri dari:
- a) Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan adalah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan

kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda. Selanjutnya Dian dan Anggraeni (2011) mengatakan kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak

Program *Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program *tax amnesty*

sendiri berlaku sejak disahkan hingga 31 maret 2017, dan terbagi ke dalam

3 periode, yaitu:

1. Periode I: dari tanggal diundangkan s.d 30 september 2016
2. Periode II: dari tanggal 1 oktober 2016 s.d 31 desember 2016
3. Periode III: dari tanggal 1 januari 2017 s.d 31 maret 2017

Adapun tujuan penyusunan undang-undang tentang Program *Tax Amnesty* (Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk mengajukan program *Tax Amnesty* wajib pajak harus ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar atau di tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa surat pernyataan. Ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan

oleh menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Adapun menurut Muliari dan Setiawan (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan formal, Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan Materiil, Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai

dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar.

Menurut Triana (2010) Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Agar wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, maka direktorat jendral pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan program *Tax Amnesty*. menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada sanksi perpajakan dan program *Tax*

Amnesty secara simultan atau bersama-sama akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kapatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Selain itu dengan adanya program *tax amnesty* akan memotivasi wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar

Kerangka Hipotesis

Gambar 1.
Kerangka Hipotesis

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh sumber asli secara langsung. Data

primer dalam penelitian ini diambil dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi.

Definisi Operasional Variabel

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen, dan variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah Sanksi Perpajakan dan program *Tax Amnesty*.

1. Variabel Terikat

Dalam penelitian ini variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Variabel Bebas

Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan (X_1) dan program *Tax Amnesty* (X_2)

Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Biak (Jl. Adibai Sumberker Samofa, Sorido, Biak Kota). Berdasarkan data diperoleh 49.348 Wajib Pajak Lapor SPT. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling sebanyak 100 responden.

Penelitian ini menggunakan analisa regresi, dengan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Sanksi Perpajakan

X_2 = Program *Tax amnesty*

α = Konstanta (Intersept)

β = Koefisien regresi

ε = *Standart Error*

Hipotesis statistiknya:

H_0 ; $\beta_1 = 0$: sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 : $\beta_1 \neq 0$: sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_0 ; $\beta_2 = 0$: program tax amnesty tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_1 : $\beta_2 \neq 0$: program tax amnesty mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa regresi linear berganda adalah sebagai berikut¹.

1 Tidak ada indikasi pelanggaran terhadap asumsi klasik.

Tabel 2.
Hasil dari Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.317	3.006		4.762	.000
Sanksi Perpajakan	.480	.164	.270	2.932	.004
Tax Amnesty	.509	.122	.383	4.166	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Tabel 3.
Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.547 ^a	.299	.285	3.421

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan

Adjusted R square menunjukkan hanya 28,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua variabel yang diteliti. Hal ini bisa dikatakan model ini jauh dari sempurna dikarenakan sekitar 70% variabel lain mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel .4
Hasil Pengujian t-Hitung dan T- tabel

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	484.952	2	242.476	20.720	.000 ^a
	Residual	1135.158	97	11.703		
	Total	1620.110	99			

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Bila t-hitung < t-tabel maka hipotesis nol (H_0) diterima.

Sedangkan tabel diatas menunjukkan sanksi perpajakan dan program tax amnesty mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang memiliki kesimpulan bahwa Sanksi Perpajakan dan *Tax Amnesty*

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Juga sesuai dengan penelitian Dian dan Anggraeni (2011) mengatakan kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak

Sedangkan Istiqomah (2016) menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan WPOP yang mempunyai usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun tahun dan jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun serta jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Adanya sanksi pajak dan Program *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak yang diberikan oleh pemerintah telah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini terbukti dengan terjadinya peningkatan penerimaan Negara lewat pajak dari pengalihan harta yang belum diungkapkan baik dari dalam Negeri ataupun dari luar Negeri setelah diberlakukannya program *Tax Amnesty*, tentunya hal ini tidak lepas dari kekhawatiran Wajib Pajak jika tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi denda yang lumayan besar jumlahnya, yaitu

2% per bulannya dari pajak yang terutang. Adapun jika mengikuti *Tax Amnesty* wajib pajak akan rela membayar uang tebusan yang jumlahnya jauh lebih kecil di bandingkan dengan membayar sanksi pajak yang besarnya 2% per bulan. Oleh karena Program *Tax Amnesty* dominan pengaruhnya dibanding sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika wajib pajak sudah berubah menjadi patuh dalam membayar pajak ke depannya akan muncul kesadaran dalam membayar pajak. Wajib Pajak akan sadar dan mengerti terhadap arti pentingnya pajak guna membiayai pembangunan nasional. Pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk terlibat membayar keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara sangat di butuhkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini para wajib pajak pada KPP Pratama Biak – Papua menilai bahwa sanksi perpajakan dan Program *Tax Amnesty* mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya sanksi perpajakan, pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi, adapun disisi lain dengan adanya program *tax amnesty* yang salah satu keuntungannya yaitu penghapusan sanksi dalam bidang perpajakan

maka dimanfaatkan oleh wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, dengan ini Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Dan, Program *Tax Amnesty* memiliki pengaruh yang dominan dibandingkan dengan Sanksi Perpajakan dikarenakan kebijakan *tax amnesty* memberikan pembebasan sanksi dan penghapusan pajak, penghapusan sanksi administrasi, dan penghapusan sanksi pidana atas pajak dan harta yang belum dilaporkan, sehingga wajib pajak banyak yang memilih memanfaatkan program *Tax Amnesty* agar dapat terbebas dari sanksi yang seharusnya diterimanya. Dibandingkan sanksi denda yang akan dikenakan atas pajak terutang dengan menggunakan perhitungan denda dan bunga yang di rasa memberatkan para wajib pajak di KPP Pratama Biak-Papua.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, P.J.A. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. 2.
- Dian Anggreani, Monica. 2011. *Pengaruh pemanfaatan fasilitas perpajakan Sunset Policy terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak* (jurnal). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aviantara, Aris. 2011. *Mengenal Sanksi Pajak*. www.aviantara.wordpress.com/2011/04/18/mengenal-sanksi-pajak/. Diakses pada 18 April 2011.
- Dwisetiati. 2013. *Sanksi Perpajakan*. www.dwisetiati.wordpress.com/2013/01/09/sanksi-perpajakan/, Diakses pada 9 Januari 2013.
- Hanif, 2016. *Makalah Peran Tax Amnesty Dalam Pembangunan Indonesia*. www.hanifhanifku.blogspot.co.id/2016/09/makalah-peran-tax-amnesty-dalam.html. Diakses pada 29 September 2016.
- Hariyanto, Bambang. 2012. *Pengertian Kepatuhan Menurut Para Ahli*. www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html, Diakses pada 22 Juni 2012.
- Haryanto, Joko Tri. 2016. *Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan 2016*. www.kemenkeu.go.id/Artikel/tax-amnesty-dan-kinerja-perpajakan-2016. Diakses pada 7 April 2016.
- Hasril, 2016. *Makalah Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*. www.hasrilweb.wordpress.com/tag/makalah-tax-amnesty/. Diakses pada 26 November 2016.
- Istiqomah. 2016. *Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan adanya kebijakan sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul* (jurnal). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kartika, Henny. 2008. *Simpel Random Sampling*. www.hennykartika.wordpress.com

- s.com/2008/01/27/simple-random-sampling/. Diakses pada 27 Januari 2008.
- Laili, Amin. 2013. *Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak*. www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak, Diakses pada 25 November 2013.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2016. *Pengaruh Sanset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (jurnal). Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. 2009. *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Denpasar Timur* (jurnal). Bali: Universitas Udayana.
- Pinontoan, Okky. 2017. *Periode Akhir Tax Amnesty , KPP Pratama Biak optimalkan pelayanan*. www.rri.co.id/biak/post/berita/369427/ekonomi/periode_akhir_tax_amnesty_kpp_pratama_biak_optimalkan_pelayanan.html, Diakses pada 8 Maret 2017.
- Pinontoan, Okky. 2017. *Wajib Pajak di Biak, Diimbau Segera Laport SPT Tahunan*. www.rri.co.id/post/berita/370350/daerah/wajib_pajak_di_biak_diimbau_segera_laport_spt_tahunan.html, Diakses pada 8 Maret 2017.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Soeroji, Oji. 2017. *Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak*. www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak, Diakses pada 1 Maret 2017.
- Sugiono, 2008. *Statistik Deskriptif dan statistik inferensial*. www.jamstatistic.id/2014/01/statistik-deskriptif-dan-statistik.html. Diakses pada 01 Januari 2014
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. *Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan* (jurnal). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan*